

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------|
| Media Cetak | Jawa Pos |
| Media Online | |

Wilayah: Kota Surakarta

Halaman 6

Korbankan Lima Proyek demi Atasi Covid-19

Dana Pilkada Aman

SOLO, *Jawa Pos* — Pemkot merasionalisasi anggaran pembangunan infrastruktur yang telah diplot pada tahun ini untuk penanganan korona. Sedikitnya ada lima proyek yang dikorbankan.

Dalam rapat pimpinan DPRD Surakarta dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Senin (30/3), Pemkot memasang anggaran Rp 49,4 miliar untuk penanganan Covid-19.

Nominal tersebut diambil dari berbagai program yang berasal dari empat sumber anggaran, yaitu dana insentif daerah (DID), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), bantuan gubernur (bangub), dan APBD 2020. Sumber APBD menyumbang kontribusi tertinggi dalam rasionalisasi kali ini, yakni Rp 45,9 miliar.

Dengan begitu, dipastikan dana pilkada 2020 tak diutak-atik. "Kami tidak merasionalisasi anggaran pilwalkot. Kami hanya



BAGUS/JAWA POS

merasionalisasi pembangunan fisik yang belum mendesak," terang Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo di rumah dinas Loji Gandrung, Selasa (31/3).

Terkait beredarnya kesimpulan rapat kerja/rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan menteri dalam negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta penundaan pilkada serta merealokasi anggaran pilkada untuk penanganan Covid-19, wali kota tak mau memutuskan tanpa aturan yang jelas.

"Kami *nggak* berani. Harus ada perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) dulu. Kalau langsung kami pangkas (dana pilkada), *seneni uwong mengko* (dimarahi orang nanti)," tegasnya.

Sekadar informasi, Pemkot mengucurkan Rp 21 miliar untuk penyelenggaraan, pengawasan,

hingga pengamanan Pilwalkot 2020. Wali kota memastikan tidak akan menyentuh dana tersebut hingga ada regulasi yang jelas.

Sementara itu, status kejadian luar biasa (KLB) korona berdampak pada kinerja Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu tersebut memberhentikan sementara panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) dan panwaslu kelurahan.

"Panwascam dan panwas kelurahan mulai nonaktif pada awal April ini. Surat maupun koordinasi telah kami berikan dan laksanakan dengan *video conference*, Senin 29 Maret 2020," terang Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono.

Menurut dia, pemberhentian sementara panwascam maupun panwas kelurahan karena beberapa tahapan pilkada ditunda KPU sebagai antisipasi merebaknya virus korona. (irw/wa/c5)